

Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah dan Pandemi Covid-19 terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Tahun 2015-2024

Meldi Herdiansyah^{1*}, Marselina²

¹⁻²Universitas Lampung, Indonesia

Alamat Kampus : Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1, Gedung Meneng, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35145, Indonesia

*Korespondensi penulis: herdiansyahmeldi06@gmail.com

Abstract. *This study aims to determine the effect of the Regional Financial Independence Ratio, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, Capital Expenditure Harmony Ratio as independent and Covid Pandemic as Dummy variables on Economic Growth as the dependent variable in 10 Provinces on Sumatra Island during the 2015-2024 period using EViews 12 for panel data analysis. The best approach for this regression model is the Fixed Effect Model (FEM) using the Panel EGLS (Cross-section weights) method, determined through the Chow Test and Hausman Test. Partially, the regional financial independence ratio has no significant effect on economic growth. The effectiveness ratio, efficiency ratio, and capital expenditure harmony ratio partially have a positive and significant effect on economic growth. The Covid pandemic dummy variable partially has a negative and significant effect on economic growth. Simultaneously, the regional financial independence ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio, capital expenditure harmony ratio, and Covid pandemic dummy variables have a significant effect on the economic growth of the 10 Provinces on Sumatra Island.*

Keywords: *Capital Expenditure Harmony Ratio, Covid Pandemic Dummy, Economic Growth, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kecerahan Belanja Modal sebagai variabel bebas dan Dummy Pandemi Covid sebagai variabel dummy terhadap Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel dependen/terikat pada 10 Provinsi di Pulau Sumatera selama 2015-2024 menggunakan aplikasi EViews 12 data panel. Uji terbaik dalam model regresi ini menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM) dengan metode Panel EGLS (*Cross-section weights*) melalui Uji Chow dan Uji Hausman. Secara parsial rasio kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio keserasian belanja modal secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel dummy pandemi Covid secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara simultan variabel rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian belanja modal, dan dummy pandemi Covid berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 10 Provinsi di Pulau Sumatera.

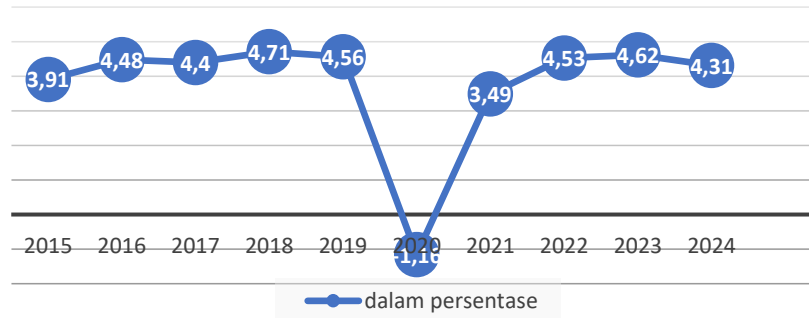
Kata kunci: Dummy Pandemi Covid, Pertumbuhan Ekonomi, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

1. LATAR BELAKANG

Peningkatan ekonomi memiliki peranan penting dalam menciptakan kesejahteraan sosial serta menjadi tolok ukur untuk mengukur keberhasilan sebuah sistem ekonomi. Pembahasan mengenai pertumbuhan ekonomi, yang secara kuantitatif diukur melalui dinamika Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), masih menjadi fokus utama dalam diskusi ekonomi hingga kini dan terus menjadi objek analisis yang mendalam. Pada hakikatnya, pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan produksi secara keseluruhan dalam kurun waktu tertentu, yang menandakan bahwa suatu wilayah

mengalami perkembangan ekonomi apabila total produksi barang dan jasanya mengalami peningkatan yang stabil (Gujarati & Porter, 2009).

Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi Sumatera



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Pulau Sumatra merupakan salah satu kawasan terluas di Indonesia dan memiliki posisi strategis dalam mendorong pertumbuhan PDRB nasional. Berkat kekayaan sumber daya alam, sektor industri yang berkembang pesat, serta kontribusi penting dari bidang perkebunan, pertambangan, dan energi, Sumatra menjadi salah satu motor penggerak ekonomi nasional di luar Pulau Jawa. Perkembangan ekonomi di Pulau Sumatra pada rentang 2015 hingga 2024 menunjukkan naik turun yang dipengaruhi oleh berbagai faktor dari dalam maupun luar negeri. Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi mencatatkan angka 4,71%, merupakan salah satu pencapaian tertinggi sebelum masa pandemi. Akan tetapi, situasi berubah drastis pada tahun 2020, ketika pandemi COVID-19 mengganggu kegiatan ekonomi secara menyeluruh, yang mengakibatkan ekonomi Sumatra mengalami kontraksi sebesar -1,16% dan menjadi keterpurukan terburuk sejak tahun 1998.

Naik turunnya pertumbuhan ekonomi ini menggambarkan bagaimana kondisi makroekonomi, kebijakan keuangan negara, dan pengelolaan keuangan daerah sangat mempengaruhi kinerja ekonomi. Melalui desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam mengelola keuangannya, baik mengenai penerimaan maupun pengeluaran, agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan (Oates, 2003; Nugroho & Candrawati, 2025). Dalam era desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memperoleh kewenangan penuh dalam mengelola keuangan daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Prinsip

"uang mengikuti fungsi" menyatakan bahwa penerimaan tugas harus diikuti dengan kemampuan finansial yang cukup. Jika pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara efisien dan efektif, maka APBD dapat menjadi instrumen yang mendorong kemajuan ekonomi lokal (Halim, 2016; Abdullah, 2017).

Tabel 1 Realisasi Dau 10 Provinsi di Sumatera 2015 - 2024 (Dalam Milyar).

Prov/tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aceh	1.237,89	1.263,87	2.060,26	2.060,26	2.322,27	1.956,49	1.945,98	1.947,78	2.015,96	2.186,89
Sumatera Utara	1.139,26	1.604,50	2.629,22	2.629,22	2.754,58	2.474,47	2.463,69	2.463,69	2.683,05	2.876,29
Sumatera Barat	1.221,13	1.261,91	2.014,65	2.014,65	2.076,43	1.891,32	1.887,03	1.887,03	1.989,35	2.061,36
Riau	654,22	737,74	1.458,00	1.465,26	1.548,58	1.432,35	1.455,38	1.455,38	1.506,32	1.584,77
Kepulauan Riau	695,94	866,81	1.059,82	1.150,52	1.190,06	1.099,29	1.092,93	1.092,93	1.131,18	1.177,92
Jambi	1.009,17	1.070,45	1.397,91	1.399,37	1.440,42	1.288,42	1.284,88	1.284,88	1.329,86	1.381,59
Sumatera Selatan	931,92	1.071,42	1.697,90	1.697,90	1.775,42	1.568,60	1.563,04	1.563,04	1.653,77	1.740,47
Bangka Belitung	897,89	905,53	980,30	1.018,67	1.052,09	942,31	939,55	940,86	973,79	1.008,69
Bengkulu	1.046,08	1.070,75	1.301,54	1.301,54	1.334,18	1.219,95	1.213,76	1.213,76	1.267,64	1.299,70
Lampung	1.097,13	1.321,67	1.851,60	1.857,04	1.927,01	1.732,55	1.726,30	1.726,30	1.801,10	1.968,70

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2025) data di olah

Tabel 2 Realisasi DAK 10 Provinsi di Sumatera 2015 - 2024 (Dalam Milyar).

Prov/tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aceh	70,87	151,77	258,09	265,37	314,97	252,93	288,20	271,05	338,65	347,60
Sumatera Utara	47,75	152,32	276,80	315,56	341,92	335,51	261,03	282,34	406,60	386,49
Sumatera Barat	62,73	152,88	180,85	225,40	240,42	267,96	235,07	255,16	365,93	217,86
Riau	63,36	258,18	127,61	129,06	249,43	254,33	254,12	257,91	295,14	235,32
Kepulauan Riau	42,54	71,24	149,43	154,82	161,24	198,49	174,48	159,64	299,22	157,56
Jambi	57,94	152,72	162,29	163,73	173,72	186,76	194,60	216,04	340,55	234,12
Sumatera Selatan	69,41	158,44	141,48	345,42	231,44	203,72	220,51	188,86	261,64	236,10
Bangka Belitung	44,36	131,53	128,39	147,89	137,33	169,74	140,75	136,82	124,18	90,82
Bengkulu	63,89	153,07	149,61	110,70	148,68	136,45	177,20	207,52	268,64	262,11
Lampung	245,07	285,02	260,39	449,74	283,77	263,39	310,50	324,71	280,29	251,30

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2025) data di olah

Tinjauan kebijakan fiskal pada 10 provinsi di Sumatera mengungkapkan bahwa otonomi desentralisasi belum sepenuhnya mewujudkan kemandirian ekonomi daerah. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagian besar provinsi Sumatera masih bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat, terutama realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Data menunjukkan bahwa realisasi DAU berfungsi sebagai pendukung utama likuiditas daerah, namun penggunaannya lebih banyak menyerap kebutuhan belanja operasional rutin dan belanja pegawai. Sementara itu, realisasi DAK fisik dan non-fisik yang sesungguhnya ditujukan untuk infrastruktur dan layanan dasar kerap menghadapi permasalahan penyerapan yang lambat. Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sebagian besar provinsi Sumatera mencerminkan ruang fiskal yang sangat terbatas, sehingga pemerintah daerah mengalami kesulitan untuk melakukan investasi mandiri melalui belanja modal (Mahmudi, 2010; Maryanti et al., 2023).

Kerentanan APBD di Sumatera semakin terlihat ketika menghadapi guncangan pandemi Covid-19 yang mendorong kebijakan intervensi pusat melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kebijakan PEN secara langsung mengubah dan berdampak signifikan pada struktur APBD seluruh provinsi Sumatera. Berdasarkan instruksi pemerintah pusat, pemerintah provinsi serta kabupaten/kota diharuskan menjalankan refocusing dan realokasi anggaran. Dampaknya, alokasi belanja modal untuk pembangunan infrastruktur fisik harus dipotong secara substansial dan dialihkan kepada jaring pengaman sosial, insentif Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta penanganan krisis kesehatan. Di sisi lain, fluktuasi penerimaan DAU akibat penurunan penerimaan negara mengharuskan beberapa daerah di Sumatera mencari pembiayaan alternatif melalui Pinjaman PEN Daerah atau menyerap Dana Insentif Daerah (DID) tambahan agar likuiditas APBD tetap terjaga dan ekonomi tidak mengalami kontraksi yang lebih dalam (Sari et al., 2024).

Secara konseptual, pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas seharusnya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kemandirian dan kualitas belanja publik (Oates, 2003; Halim, 2016). Namun demikian, bukti empiris menunjukkan bahwa interaksi antara ketergantungan realisasi DAU/DAK, efektivitas serta efisiensi penyerapan, keselarasan belanja modal, dan intervensi kebijakan seperti PEN memiliki hubungan yang kompleks dengan pertumbuhan ekonomi di lapangan. Beberapa periode menunjukkan bahwa indikator kinerja pengelolaan keuangan daerah belum diimbangi dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang

berarti, mengingat guncangan krisis dan besarnya porsi belanja rutin menekan alokasi belanja modal. Temuan serupa ditunjukkan oleh penelitian Fatmawati (2021), Dian dan Sari (2021), serta Maryanti et al. (2023) yang menemukan bahwa kinerja keuangan daerah tidak selalu memberikan pengaruh yang konsisten terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kemampuan pengelolaan keuangan daerah perlu dipetakan dari berbagai sudut pandang. Parameter keberhasilan pengelolaan keuangan daerah diukur dari kemampuan daerah dalam menemukan dan mengusahakan potensi sumber daya keuangan yang dimilikinya, yang dapat dievaluasi melalui perhitungan rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Mahmudi, 2010; Halim, 2016). Indikator tersebut meliputi rasio kemandirian (ketergantungan terhadap bantuan pusat), rasio efektivitas, rasio efisiensi, serta rasio keserasian belanja modal. Di wilayah Sumatra, tingkat kemandirian keuangan daerah secara rata-rata masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, hanya Provinsi Sumatera Utara dan Lampung yang memiliki rasio kemandirian di atas rata-rata nasional. Di samping itu, rasio keserasian belanja modal di 10 provinsi Sumatra secara rata-rata masih di bawah 20%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran daerah dipakai untuk memenuhi kebutuhan operasional rutin dibandingkan investasi jangka panjang.

Bukti di lapangan menunjukkan bahwa hubungan antara rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, dan keserasian belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi tidak selalu sesuai dengan teori yang ada, terutama ketika terjadi guncangan pandemi COVID-19. Beberapa penelitian menunjukkan hasil yang berbeda-beda terkait pengaruh indikator kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, seperti penelitian Fatmawati (2021), Hidayat dan Hasbiullah (2023), Cahyaning dan Putri (2023), serta Dian dan Sari (2021). Mengingat hal tersebut, peneliti bermaksud untuk mengkaji lebih jauh bagaimana pengaruh kinerja pengelolaan keuangan daerah serta variabel dummy pandemi Covid-19 terhadap pertumbuhan ekonomi di 10 provinsi di Sumatra dalam kurun waktu 2015–2024.

2. KAJIAN TEORITIS

Pertumbuhan ekonomi merupakan cermin keberhasilan proses pembangunan suatu negara yang didukung oleh kemajuan modal, teknologi, ketersediaan sumber daya alam, serta kualitas tenaga kerja (Gujarati & Porter, 2009). Dalam konteks otonomi daerah, pertumbuhan ekonomi suatu wilayah sangat ditentukan oleh keberhasilan

desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal merujuk pada pemberian kekuasaan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan wilayah secara mandiri demi mendukung tugas atau fungsi pemerintahan yang didelegasikan (Oates, 2003; Nugroho & Candrawati, 2025). Melalui kebijakan ini, daerah memperoleh hak untuk melaksanakan pemungutan pendapatan asli daerah (PAD), menerima transfer dari pusat, serta menentukan alokasi pengeluaran rutin dan investasi. Penilaian terhadap pengelolaan keuangan daerah tersebut dilakukan melalui analisis rasio-rasio keuangan terhadap APBD (Mahmudi, 2010; Halim, 2016).

Kinerja keuangan daerah menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mencapai tujuan dalam pengelolaan aspek keuangannya (Abdullah, 2017). Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhannya sendiri, yang diperoleh dengan membandingkan PAD terhadap total pendapatan transfer (Mahmudi, 2010; Halim, 2016). Rasio efektivitas mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam memenuhi target PAD yang telah ditetapkan. Rasio efisiensi menilai sejauh mana suatu kegiatan dijalankan dengan penggunaan input (pengeluaran belanja) yang optimal dibandingkan dengan output (pendapatan) yang dihasilkan. Sementara itu, rasio keserasian belanja modal mengevaluasi besaran proporsi pengeluaran daerah yang diperuntukkan bagi investasi fisik yang memberikan dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi (Mahmudi, 2010; Halim, 2016; Setiyanto, 2021).

Sejumlah studi sebelumnya menghasilkan temuan yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan oleh Komaedi et al. (2024) mengungkapkan bahwa efisiensi memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan kemandirian dan efektivitas tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Sebaliknya, Cahyaning dan Putri (2023) menarik kesimpulan bahwa rasio efektivitas dan efisiensi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian Fatmawati (2021), Dian dan Sari (2021), Hidayat dan Hasbiullah (2023), serta Maryanti et al. (2023) juga menunjukkan bahwa hubungan antara indikator kinerja keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi masih menghasilkan temuan yang beragam. Berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir tersebut, hipotesis dalam penelitian ini menduga bahwa rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio keserasian belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pandemi Covid-19 memberikan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di 10 provinsi di Sumatera.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kuantitatif dengan populasi target meliputi 10 provinsi di Pulau Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, dan Lampung. Periode analisis berlangsung selama 10 tahun, rentang waktu 2015 hingga 2024, yang menghasilkan 100 unit observasi berupa data panel (balanced panel). Sumber data yang dimanfaatkan adalah data sekunder yang diakses melalui publikasi resmi di situs Badan Pusat Statistik (BPS) serta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2025).

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi (Y). Variabel bebas mencakup Rasio Kemandirian (X1), Rasio Efektivitas (X2), Rasio Efisiensi (X3), Rasio Keserasian Belanja Modal (X4), serta variabel Dummy Pandemi Covid-19 (X5), dengan ketentuan nilai 1 menunjukkan periode pandemi dan nilai 0 menunjukkan periode sebelum atau sesudah pandemi. Penghitungan setiap rasio dilakukan berdasarkan formula standar analisis kinerja keuangan daerah yang tercantum dalam pedoman Kementerian Dalam Negeri.

Pengolahan data memakai metode regresi data panel yang menggabungkan karakteristik data runtut waktu (time series) dan silang tempat (cross-section). Penentuan model regresi paling tepat di antara Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM) dilakukan melalui Uji Chow dan Uji Hausman. Asumsi klasik yang diuji mencakup uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Model persamaan regresi data panel yang akan diestimasi diformulasikan sebagai: $Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + \mu$.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai rata-rata, nilai maksimum, dan minimum dari variabel penelitian selama periode 10 tahun. Pertumbuhan ekonomi rata-rata (Y) di 10 provinsi Sumatera tercatat sebesar 3,76%, dengan nilai maksimum 6,02% dan minimum -3,80% (terjadi saat pandemi 2020). Rasio Kemandirian (X1) memiliki rata-rata sebesar 41,79%. Angka ini mengindikasikan bahwa secara umum, provinsi di Sumatera masih berada pada kategori kurang mandiri dan sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Meskipun demikian, pencapaian ini relatif

lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata kemandirian fiskal tingkat nasional sebesar 18% hingga 22,77%. Di balik rata-rata regional tersebut, terdapat variasi ketimpangan yang sangat mencolok antardaerah di Sumatera. Provinsi Sumatera Utara dan Riau tercatat sebagai daerah dengan tingkat kemandirian tertinggi, yang secara konsisten mampu mencatatkan rasio di atas 60%. Tingginya kemandirian fiskal di kedua provinsi ini ditopang oleh kuatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari sektor unggulan mereka, yakni industri minyak dan gas (migas) serta skala masif komoditas perkebunan. Sebaliknya, provinsi seperti Aceh, Bengkulu, dan Kepulauan Riau mencatatkan rasio kemandirian terendah, yang mempertegas ketergantungan absolut mereka terhadap suntikan dana alokasi dari pemerintah pusat. Rasio Efektivitas (X2) mencatat rata-rata sangat tinggi sebesar 98,35%, mengindikasikan target PAD mayoritas tercapai. Rasio Efisiensi (X3) rata-rata berada pada angka 98,26%. Rasio Keserasian Belanja Modal (X4) berada pada angka rata-rata yang relatif rendah, yaitu 16,14%, menandakan alokasi anggaran infrastruktur yang masih minim.

Penentuan Model Regresi Data Panel

Penentuan model terbaik antara Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM) dilakukan melalui serangkaian uji statistik.

Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.284247	(9,85)	0.0240
Cross-section Chi-square	21.66114	9	0.0100
	3		

Tabel di atas menunjukkan hasil uji Chow dengan nilai probabilitas F-statistik sebesar 0,0240. Karena probabilitas lebih kecil dari taraf signifikansi 5% (0,05), maka H_0 ditolak. Dengan demikian, model yang lebih baik digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM) dibandingkan Common Effect Model (CEM).

Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.000000	5	1.0000

* Cross-section test variance is invalid. Hausman statistic set to zero.

Berdasarkan uji Hausman, diperoleh nilai statistik 0,0000 dengan probabilitas 1.0000, disertai pesan peringatan mengenai varians (*Cross-section test variance is invalid*). Secara praktis, matriks varians-kovarians dari perbedaan estimator tidak positive definite, yang menandakan pelanggaran asumsi Random Effect Model. Mengikuti rekomendasi literatur ekonometrika (Baltagi, 2021; Gujarati, 2004), Fixed Effect Model (FEM) diadopsi karena memberikan estimasi yang lebih konsisten untuk data populasi penuh provinsi.

Regresi Data Panel Fixed Effect Model

Dependent Variable: Y

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)

Date: 04/15/26 Time: 20:52

Sample: 2015 2024

Periods included: 10

Cross-sections included: 10

Total panel (balanced) observations: 100

Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-119.4467	23.96060	-4.985130	0.0000
X1	-0.014562	0.028539	-0.510254	0.6112
X2	0.916719	0.149617	6.127102	0.0000
X3	0.337012	0.130255	2.587330	0.0114
X4	0.072092	0.041174	1.750907	0.0836
X5	-2.054614	0.341353	-6.019026	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics

Root MSE	1.387337	R-squared	0.588881
Mean dependent var	4.174105	Adjusted R-squared	0.521168
S.D. dependent var	2.507460	S.E. of regression	1.504779
Sum squared resid	192.4705	F-statistic	8.696637
Durbin-Watson stat	2.054918	Prob(F-statistic)	0.000000

Unweighted Statistics

R-squared	0.531145	Mean dependent var	3.768900
Sum squared resid	193.1853	Durbin-Watson stat	1.931384

Berdasarkan tabel regresi menggunakan Fixed Effect Model (EGLS Cross-section weights), persamaan regresi yang terbentuk adalah: $Y = -119,4467 - 0,014562 X1 + 0,916719 X2 + 0,337012 X3 + 0,072092 X4 - 2,054614 X5$

Uji Asumsi Klasik

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji Panel Cross-section Heteroskedasticity Likelihood Ratio (LR) Test menghasilkan nilai Likelihood ratio sebesar 12,54658 dengan probabilitas 0,2501. Karena probabilitas lebih besar dari 0,05, H0 diterima, mengartikan bahwa model regresi bebas dari masalah heteroskedastisitas dan asumsi homoskedastisitas terpenuhi.

Uji Multikolinearitas

Berdasarkan matriks korelasi antar variabel independen (X1, X2, X3, X4, X5), seluruh nilai koefisien korelasi berada di bawah ambang batas 0,85. Nilai tertinggi terjadi pada korelasi X2 dan X3 yaitu -0,596467. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa tidak terjadi gangguan multikolinearitas yang serius pada model regresi.

Uji Hipotesis

Uji Pengaruh Parsial (Uji-t)

Pengujian statistik dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi (α) sebesar 5% untuk semua variabel, kecuali dinyatakan lain. Khusus untuk variabel Rasio Keserasian Belanja Modal (X4), pengujian menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengaruh positif pada tingkat signifikansi 10%.

Variabel	Coefficient	Prob (p-value)	Keterangan	Kesimpulan
X1	-0.014562	0.6112	H ₀ diterima	Tidak Signifikan
X2	0.916719	0.0000	H ₀ ditolak	Signifikan
X3	0.337012	0.0114	H ₀ ditolak	Signifikan
X4	0.072092	0.0836	H ₀ ditolak	Signifikan $\alpha=10\%$
X5	-2.054614	0.0000	H ₀ ditolak	Signifikan

Sumber: Output EViews 12, Diolah

Uji Pengaruh Simultan (Uji F) dan Koefisien Determinasi (R²)

Hasil uji signifikansi simultan menunjukkan nilai probabilitas F-statistik sebesar 0,000000. Karena angka ini jauh lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, H0 ditolak. Secara bersama-sama, rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, keserasian belanja modal, dan dummy pandemi Covid-19 berpengaruh signifikan secara simultan terhadap

pertumbuhan ekonomi 10 provinsi di Sumatera. Untuk nilai R-squared tercatat sebesar 0,588881 (58,89%). Ini membuktikan bahwa hampir 59% variasi dalam pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera pada periode observasi mampu dijelaskan secara komprehensif oleh kinerja pengelolaan keuangan daerah dan adanya krisis pandemi, sementara 41,11% sisanya dijelaskan oleh variabel makroekonomi lain di luar model ini.

Pembahasan

a) Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi:

temuan uji hipotesis mengungkapkan bahwa Rasio Kemandirian Daerah tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, terlihat dari nilai probabilitas sebesar 0,6112. Kondisi empiris ini menggambarkan desentralisasi fiskal yang belum optimal di mana Pendapatan Asli Daerah belum mampu menjadi pendorong utama aktivitas ekonomi. Dengan rata-rata tingkat kemandirian sebesar 41,79%, sebagian besar provinsi di Sumatera masih sangat mengandalkan Dana Transfer dari pemerintah pusat. Peningkatan PAD yang berhasil dihimpun sering kali terpakai untuk mendanai belanja operasional aparat birokrasi, alih-alih diinvestasikan kembali ke sektor riil yang berpotensi menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) bagi ekonomi.

b) Pengaruh Rasio Efektivitas Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi:

pengujian statistik mengungkapkan bahwa efektivitas pendapatan daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan nilai probabilitas 0,0000 yang berada di bawah 0,05 dan koefisien sebesar 0,9167. Perolehan efektivitas rata-rata yang sangat tinggi, yaitu 98,35%, menunjukkan kuatnya kapasitas pemerintahan daerah di 10 provinsi Sumatera dalam pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara konseptual, efektivitas penerimaan daerah yang tinggi ini tidak secara langsung menyentuh lapisan masyarakat, melainkan beroperasi melalui jalur transmisi kebijakan fiskal. Perolehan PAD yang optimal sangat penting untuk mencegah terjadinya shortfall atau kekurangan target penerimaan, sehingga secara langsung dapat meminimalkan atau mengurangi defisit APBD. Semakin kecil defisit yang terjadi, semakin berkurang ketergantungan pemerintah daerah untuk mencari pembiayaan alternatif melalui penambahan utang baru. Penurunan beban kewajiban utang daerah ini secara otomatis memperluas ruang fiskal (*fiscal space*). Dengan ruang fiskal yang lebih luas dan sehat, pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk melaksanakan belanja publik secara optimal. Kelancaran pelaksanaan belanja publik tersebut pada akhirnya menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) ke berbagai sektor riil dan menjadi pendorong utama

pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil temuan ini kongruen dengan penelitian Hidayat dan Hasbiullah (2023) yang menyatakan bahwa pencapaian penerimaan yang efektif berfungsi sebagai fondasi utama produktivitas perekonomian regional.

c) Pengaruh Rasio Efisiensi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi:

pengujian statistik-t menunjukkan bahwa rasio efisiensi pengumpulan pendapatan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 10 provinsi Sumatera, dengan nilai probabilitas 0,0114 yang berada di bawah 0,05 dan koefisien sebesar 0,3370. Untuk memahami hubungan ini secara logis, penting untuk mengklarifikasi terlebih dahulu definisi operasional dan formula rasio efisiensi yang diterapkan dalam penelitian ini, yaitu perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan total realisasi pendapatan daerah yang diterima ($\text{Rasio Efisiensi} = [\text{Pendapatan/Realisasi Pendapatan}] \times 100\%$). Berdasarkan rata-rata empiris sebesar 98,26%, hal ini menunjukkan bahwa untuk menghasilkan setiap Rp1,00 pendapatan daerah, pemerintahan daerah di Sumatera rata-rata mengeluarkan biaya operasional pemungutan sebesar Rp0,98. Menurut kriteria penilaian kinerja keuangan sektor publik (Halim, 2016; Mahmudi, 2010), rasio di bawah 100% secara formal masih dikategorikan sebagai "efisien" karena nilai output pendapatan masih melampaui input biaya. Akan tetapi, angka rata-rata yang nyaris mencapai ambang batas keseimbangan (98,26%) ini mengindikasikan bahwa tingkat efisiensi yang diraih sesungguhnya masih bersifat marjinal atau sangat tipis, di mana sebagian besar pendapatan hampir terserap habis oleh biaya operasional.

Alasan mendasar mengapa rasio efisiensi yang marjinal tersebut tetap memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan esensi pengeluaran pemerintahan dalam perspektif makroekonomi. Menurut teori stimulus fiskal Keynesian, setiap rupiah belanja yang dialokasikan pemerintah, meskipun digunakan untuk membiayai aktivitas operasional pemungutan pendapatan daerah, tetap berfungsi sebagai injeksi likuiditas langsung ke dalam ekonomi regional. Pengeluaran tersebut terealisasi dalam bentuk komponen belanja barang, jasa penunjang, serta honorarium yang beredar langsung di tengah masyarakat. Aliran dana ini merangsang permintaan agregat di sektor riil, menggerakkan rantai pasok lokal, dan akhirnya memberikan kontribusi neto positif terhadap pembentukan nilai tambah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi. Temuan ini diperkuat oleh kajian Muhamad, Arham, dan Djuuna (2025) yang menyatakan bahwa realisasi anggaran pengeluaran yang optimal, meskipun

dengan margin efisiensi biaya yang ketat, tetap menjadi mesin penggerak aktivitas ekonomi makro di tingkat daerah.

d) Pengaruh Rasio Keserasian Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi:

Variabel ini memberikan pengaruh positif dan signifikan pada tingkat pengujian 10%, dengan probabilitas bernilai 0,0836. Meskipun secara teoretis belanja modal memiliki peran penting bagi ekspansi ekonomi jangka panjang, rata-rata proporsi belanja infrastruktur yang hanya mencapai 16,14% membuat dampaknya terhadap pertumbuhan belum dirasakan secara maksimal. Dominasi belanja tidak langsung terus membatasi ruang fiskal yang tersedia untuk investasi daerah.

e) Pengaruh Dummy Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi:

Guncangan pandemi memberikan dampak negatif yang sangat signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi, dengan probabilitas 0,0000. Koefisien sebesar -2,054614 menunjukkan kedalaman gangguan yang terjadi: secara rata-rata ekonomi daerah mengalami kontraksi hingga 2,05%. Pembatasan mobilitas fisik yang diberlakukan, disertai kebijakan *refocusing* anggaran daerah skala besar untuk program kesehatan, secara sistematis melumpuhkan sektor produksi dan logistik andalan Sumatera seperti pertanian dan pertambangan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Secara keseluruhan, fluktuasi pertumbuhan ekonomi di 10 provinsi Sumatera selama periode 2015-2024 sangat dipengaruhi oleh tingkat efektivitas dan efisiensi serapan APBD, keserasian alokasi belanja modal, serta guncangan eksternal pandemi Covid-19. Sebaliknya, rasio kemandirian keuangan daerah terbukti belum mampu menjadi motor penggerak ekonomi regional. Kondisi ini mencerminkan bahwa desentralisasi fiskal di wilayah Sumatera belum berjalan optimal akibat tingginya ketergantungan mayoritas provinsi terhadap dana transfer pusat (DAU/DAK), di mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terkumpul masih tersedot habis untuk mendanai belanja operasional aparatur birokrasi alih-alih diinvestasikan pada sektor riil yang produktif.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, pemerintah daerah di 10 provinsi Sumatera perlu memperkuat kualitas pengelolaan fiskal melalui peningkatan alokasi belanja modal

produktif yang terintegrasi dengan pembangunan infrastruktur strategis guna meningkatkan konektivitas dan daya saing ekonomi daerah. Selain itu, upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dilakukan melalui optimalisasi dan digitalisasi pemungutan pajak serta retribusi daerah, terutama pada sektor-sektor unggulan yang memiliki potensi ekonomi tinggi, sehingga ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat dapat dikurangi. Di sisi lain, pengalaman selama pandemi Covid-19 menunjukkan pentingnya pembentukan dana cadangan daerah sebagai instrumen ketahanan fiskal yang dapat digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan perlindungan sosial masyarakat ketika terjadi guncangan ekonomi di masa mendatang.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, S. (2017). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. *Kinerja*, 8(2), 209–210. <https://doi.org/10.24002/kinerja.v8i2.898>
- Aponda, & Rumbia, W. A. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia: Analisis Data Panel Provinsi. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(1), 1191–1199. <https://jep.uho.ac.id/>
- Baltagi, B. H. (2021). *Econometric Analysis of Panel Data* (6th ed.). Springer Nature.
- Basuki, A. T. (2021). Analisis Data Panel Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis.
- Cahyaning, E., & Putri, F. (2023). Pengaruh Rasio Pertumbuhan, Rasio Efektivitas, dan Rasio Efisiensi terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(4), 257–263. <https://doi.org/10.55587/jla.v2i4.85>
- Dian, M., & Sari, I. (2021). Indonesian Accounting Research Journal Effect of efficiency, effectiveness, regional financial independence and local government service capacity on regional economic growth. *Indonesian Accounting Research Journal*, 09(02), 40–48.
- Fatmawati, A. P. (2021). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Pemerintah Kota/Kabupaten Di Riau. *Land Journal*, 2(2), 92–104. <https://doi.org/10.47491/landjournal.v2i2.1357>
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics* (5th ed.). McGraw-Hill Irwin.
- Halim, A. (2016). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hidaya, M. F., & Hasbiullah. (2023). Analisis Efisiensi Keuangan daerah dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. *ICOR: Journal of Regional Economics*, 4(2), 56–69.
- Kelola, T., Akuntabilitas, D. A. N., Negara, K., & Setiyanto, A. (2021). *Indonesia 's Capital Expenditure and Economic Growth 1990 - 2020 : Role of Accountability*. 7(2), 245–256. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v7i2.653>
- Mahmudi. (2010). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. UPP STIM YKPN.

- Maryanti, S., Handra, H., & Yonnedi, E. (2023). Kemandirian Dan Kemampuan Keuangan Daerah Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Riau. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 20(1), 9–18. <https://doi.org/10.31849/jieb.v20i1.12292>
- Nugroho, A. A., & Candrawati, C. (2025). Desentralisasi Fiskal Dan Kemandirian Daerah Pemekaran: Studi Kasus Pada Provinsi Sulawesi Barat. *Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(1), 046–057. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dialogue/article/view/26656>
- Oates, W. E. (2003). An essay on fiscal federalism. *Fiscal Federalism and European Economic Integration*, XXXVII(September), 13–47. <https://doi.org/10.4324/9780203987254>
- Sari, F. M., Astuti, A., Zamanda, D., Restu, P., & Fadilla, A. (2024). Kebijakan Fiskal dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia. In *Journal of Economics, Assets, and Evaluation* (Vol. 1, Issue 4). <https://economics.pubmedia.id/index.php/jeae>